

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Anggriani, Nani, Idang Nurodin, and Deni Iskandar. 2019. “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.” *Ekono Insentif* 13(2): 134–45.
- Arsik, Selfianti Faisal, and Herman Lawelai. 2020. “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–7.
- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto. 2016. “Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1): 1–14.
- Azulaidin, Azulaidin. 2021. “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Juripol* 4(1): 30–34.
- Denhardt, Robert B, and Janet V Denhardt. 2003. “The New Public Service: An Approach to Reform.” *International Review of Public Administration* 8(1):3– 10.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. “Reinventing Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).” *Dalam Jurnal Administrasi Negara VolumeII Nomor 2*.
- Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy. 2018. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)* 1(1).
- Fatemi, Mahboubeh, and Mohammad Reza Behmanesh. 2012. “New Public Management Approach and Accountability.” *International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS)* 1(2): 42–49.

- Febri Arifiyanto, Dwi, and Taufik Kurrohman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 473.
- Febriani, Regina, Enos Paselle, and Hariati. 2019. "Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda." *eJournal Administrasi Negara* 7(3): 9164–78.
- Henry, Nicholas. 2015. *Public Administration and Public Affairs*. Routledge. Hopwood, Anthony G, and Cyril Tomkins. 1984. "Issues in Public Sector Accounting."
- Krina, Loina Lalolo, and Loina Lalolo. 2003. "Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi." *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Larasati, Endang. 2008. "Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) Dan Partisipasi Publik." *Dialogue* 5(2): 254–67.
- Mahmudi, M. 2016. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta*.
- Mais, Rimi Gusliana, and Lini Palindri. 2020. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1(1): 57.
- Mardiasmo, Drs, and Akt MBA. 2009. "Akuntansi Sektor Publik." *Yogyakarta: Andi*.
- Miles, Matthew B, A. M. H. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Moeloeng, L. J. &. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT RemajaRosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nengsih, Widya, Fachri Adnan, and Fitri Eriyanti. 2019. "Penerapan Prinsip

Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2(1): 112–24.

Rahardjo, Adisasmita. 2011. “Manajemen Pemerintah Daerah.” *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Rantika, Devi. 2018. “Akuntabilitas Apbdes 2.” *Al-Iqtishad* I(14): 20–37.

Rindi, Kadek, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, and Putu Pania Awitiana. 2019. “PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS Pada BUMDes TEJA KUSUMA.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7(1):1– 10.

Roberts, Nancy C. 2015. *The Age of Direct Citizen Participation*. Routledge. Solihin, Dadang. 2007. “Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik.” *Vol, No, Hlm.*

Starling, G. 2008. “Managing The Public Sector 8th Edition. ThompsonWadsworth. Boston.” *MA Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*19(1).

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.

Tomuka, Shinta. 2012. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

#### **LAIN-LAIN**

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2018-2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang

## Penempatan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

